



***PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI
PADAT KARYA***

Jakarta, 15 Januari 2018

DR. ANDI ZA DULUNG MSC

DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

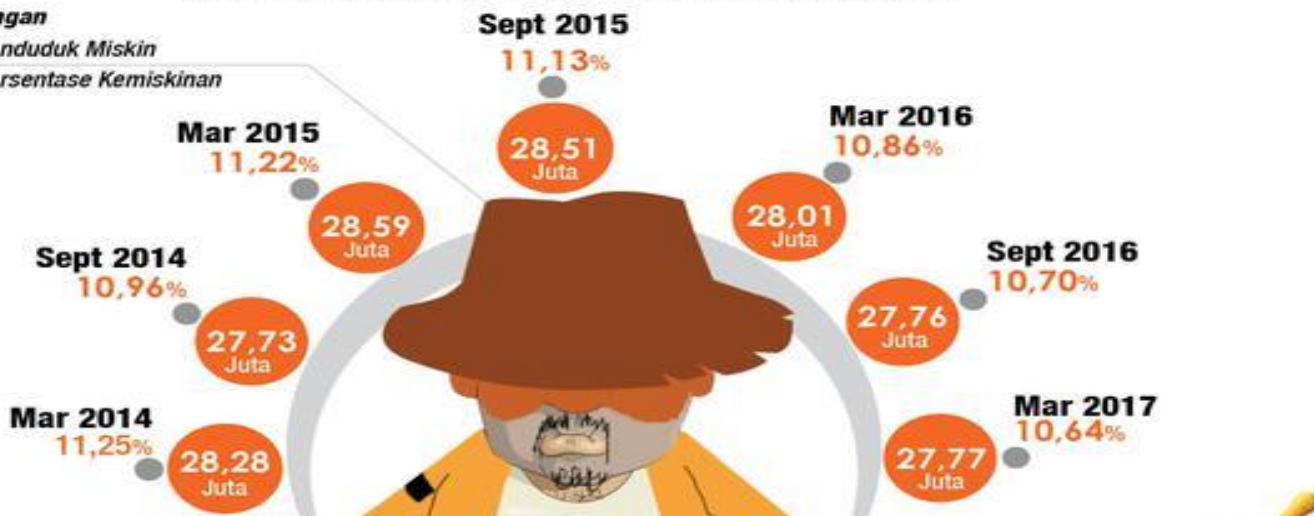
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

MASIH PERLU KERJA KERAS TEKAN KEMISKINAN

Kemiskinan menurut BPS: Ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan

Keterangan

- Penduduk Miskin
- Persentase Kemiskinan



Selain Beras, Rokok Jadi Komoditas Pendorong Kemiskinan

PERKOTAAN

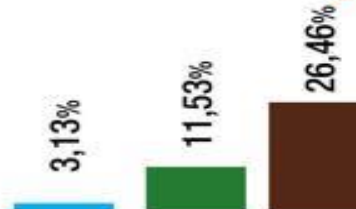


Kebutuhan orang kota pada bukan makanan lebih tinggi 7% daripada orang desa

Top 3 Komoditi Makanan

- Beras
- Telur ayam ras
- Rokok kretek filter

PERDESAAN



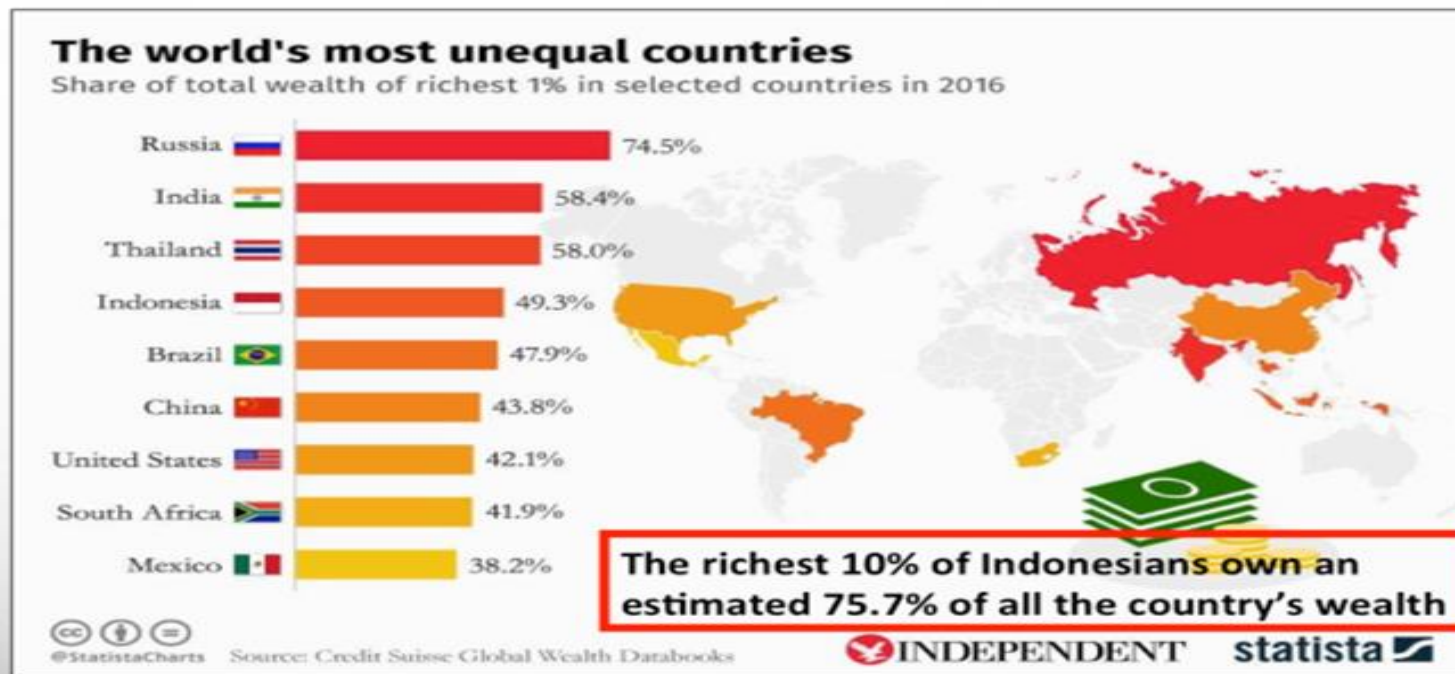
Kebutuhan orang desa pada makanan lebih tinggi 7% daripada orang kota

Sept 2017
10.12%
(26,58juta)
Rp.387.160

Indonesia termasuk yang paling timpang

- 1% dari orang yang terkaya menguasai 49,3% dari total kekayaan nasional
- 10% dari orang terkaya Indonesia memiliki 75,7% dari kekayaan nasional

Indonesia is one of the most unequal countries



Source: <http://www.independent.co.uk/news/world/politics/credit-suisse-global-wealth-world-most-unequal-countries-revealed-a7434431.html>; Raw data can be downloaded from <http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=A06F2843-B178-345E-E20A1A254A3E24A5>.



Sebab-sebab Ketimpangan

Direktur INFID: *kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin ????* (methodology question)

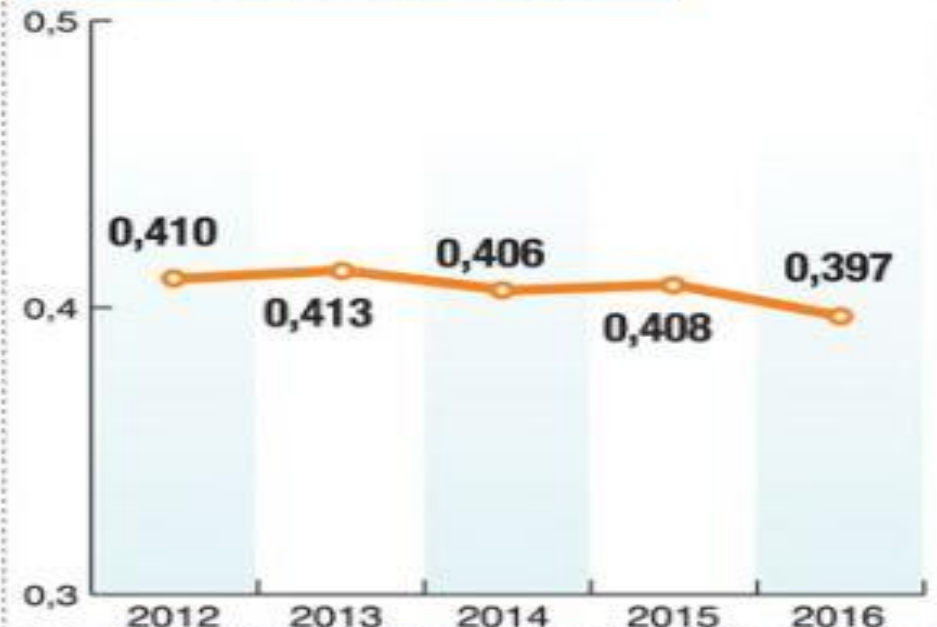
Data BPS: penduduk miskin jumlahnya 28,01 juta orang

Penyebab Ketimpangan di Indonesia

- 1 Fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya meraup keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi.
- 2 *Political capture* yang meningkat, yaitu orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh mengubah aturan yang dapat menguntungkan mereka.
- 3 Ketidaksetaraan gender.
- 4 Upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan.
- 5 Ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur.
- 6 Sistem perpajakan yang gagal memainkan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan.

Sumber: Oxfam dan Infid/BPS/L-1

Rasio Gini Indonesia

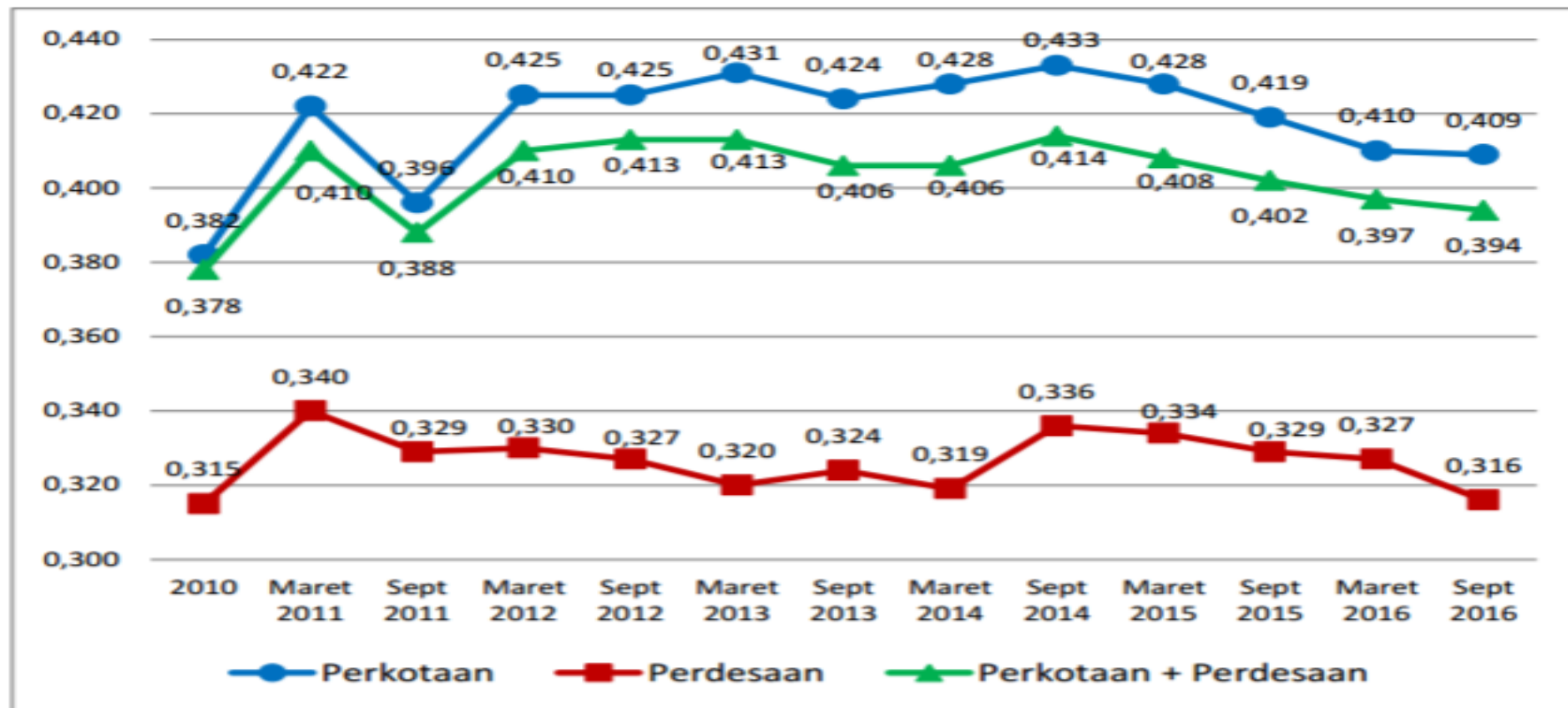


Catatan:
Rasio Gini memiliki skala 0 hingga 1. Semakin besar rasio Gini, ketimpangan semakin tinggi. Semakin kecil rasio Gini, ketimpangan semakin rendah.

Kota vs Desa

- Kemiskinan di Perkotaan 7.26% Sept 2017 (7.72% Maret 2017) dan 13.47% (13.93% Maret 2017) di Pedesaan.
- Ketimpangan didominasi di perkotaan;
- Menurunnya rasio Gini pada September 2016 tertolong dengan turunnya Gini di pedesaan (9 poin);

Gambar 1
Perkembangan Gini Ratio, 2010–September 2016



Target Kemiskinan 7-8% 2019

- Strategi khusus yang dilakukan pemerintah:
 1. Integrasi pemberian manfaat pendidikan dengan kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui jaminan kesehatan nasional (JKN)/kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta orang.
 2. Bantuan pendidikan/Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 19,7 juta orang. Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 44 kota menjadi 10 juta di 217 kabupaten/kota. Serta perluasan program keluarga harapan dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM.
- Program padat karya tunai alias cash for work.

Sinergi dan komplementaritas program KEMENSOS untuk Keluarga Miskin



**Sasaran 22 Juta Keluarga
Berpenghasilan rendah**

TRANSFORMASI PERLINDUNGAN dan JAMINAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF



KOMPLEMENTARITAS PROGRAM

Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)---KUBE/UEP

- Peningkatan kapasitas
- Peningkatan produktivitas

Bantuan Sosial ODK & Lansia, dll

Bantuan penghidupan berkelanjutan KUBE/UEP

Komplementaritas Program Bantuan Sosial Untuk GRADUASI

Keluarga Sangat Miskin

Keluarga Sejahtera Berkelanjutan

Pendampingan Sosial

Bantuan UEP/KUBE

Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)

Perbaikan Rumah / BPSU

Bantuan Langsung / Jaminan Sosial (KKS/KIP/KIS_PBI)

Benchmark

Monitoring – Evaluasi

Resertifikasi

Start

Th 1

Th 2

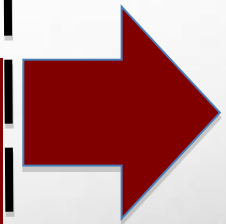
Th 3

Th 4

Th 5

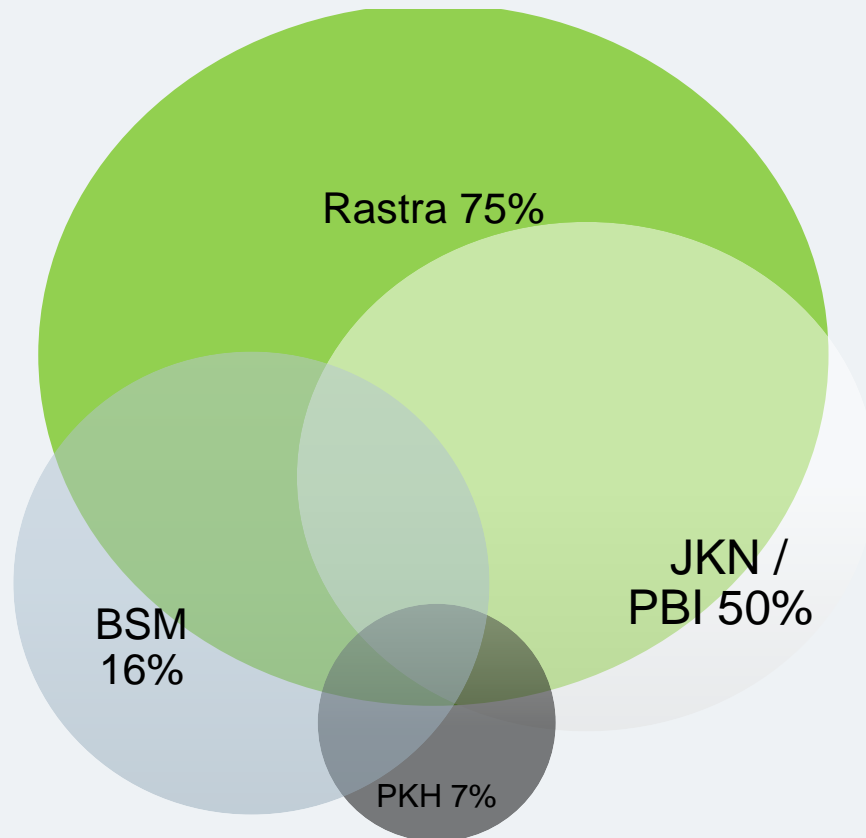
Graduasi

Maksimum



Permasalahan Pentargetan Penerima Bantuan Sosial Kurang Tepat

Cakupan rumah tangga di desil satu (termiskin) dengan program-program sosial yang berbeda

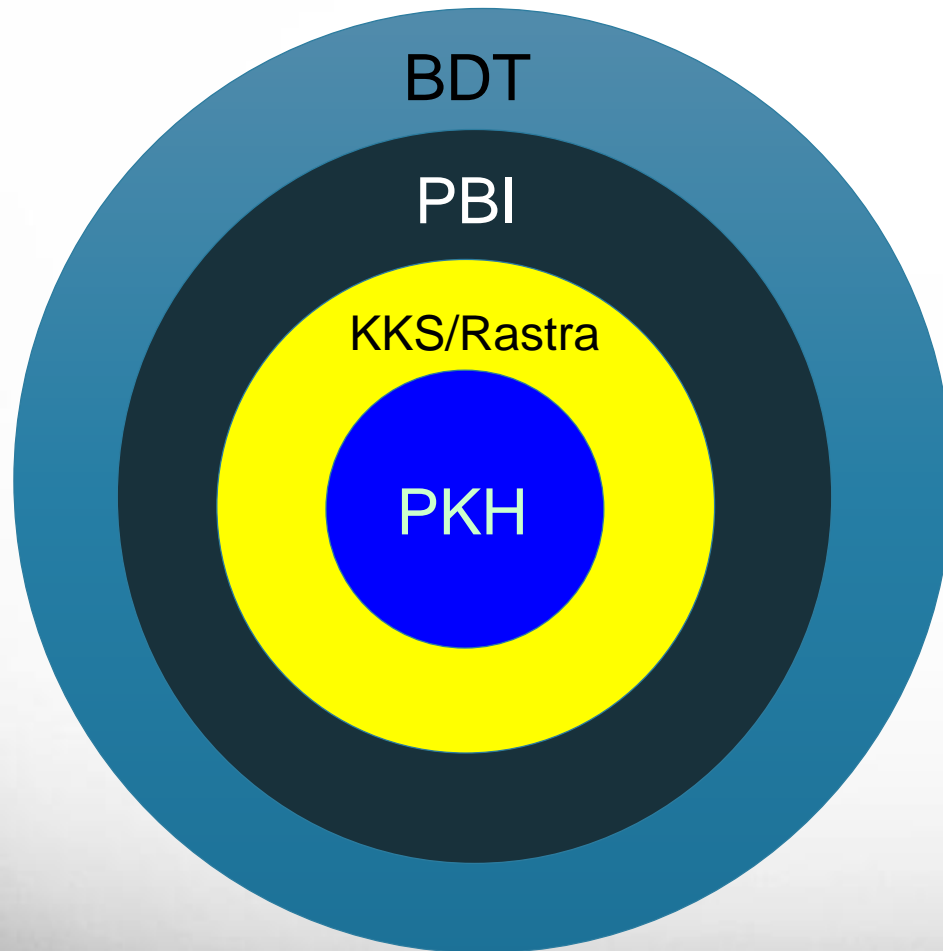


Overlap antara program sosial sangat kecil

Catatan: *Overlap* antara program di desil termiskin (10%) masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena cakupan program PKH masih kecil dan survei Susenas sulit untuk menangkap program kecil.

Sumber: Perhitungan World Bank berdasarkan Susenas 2014

Seharusnya Menjadi Satu Lingkaran

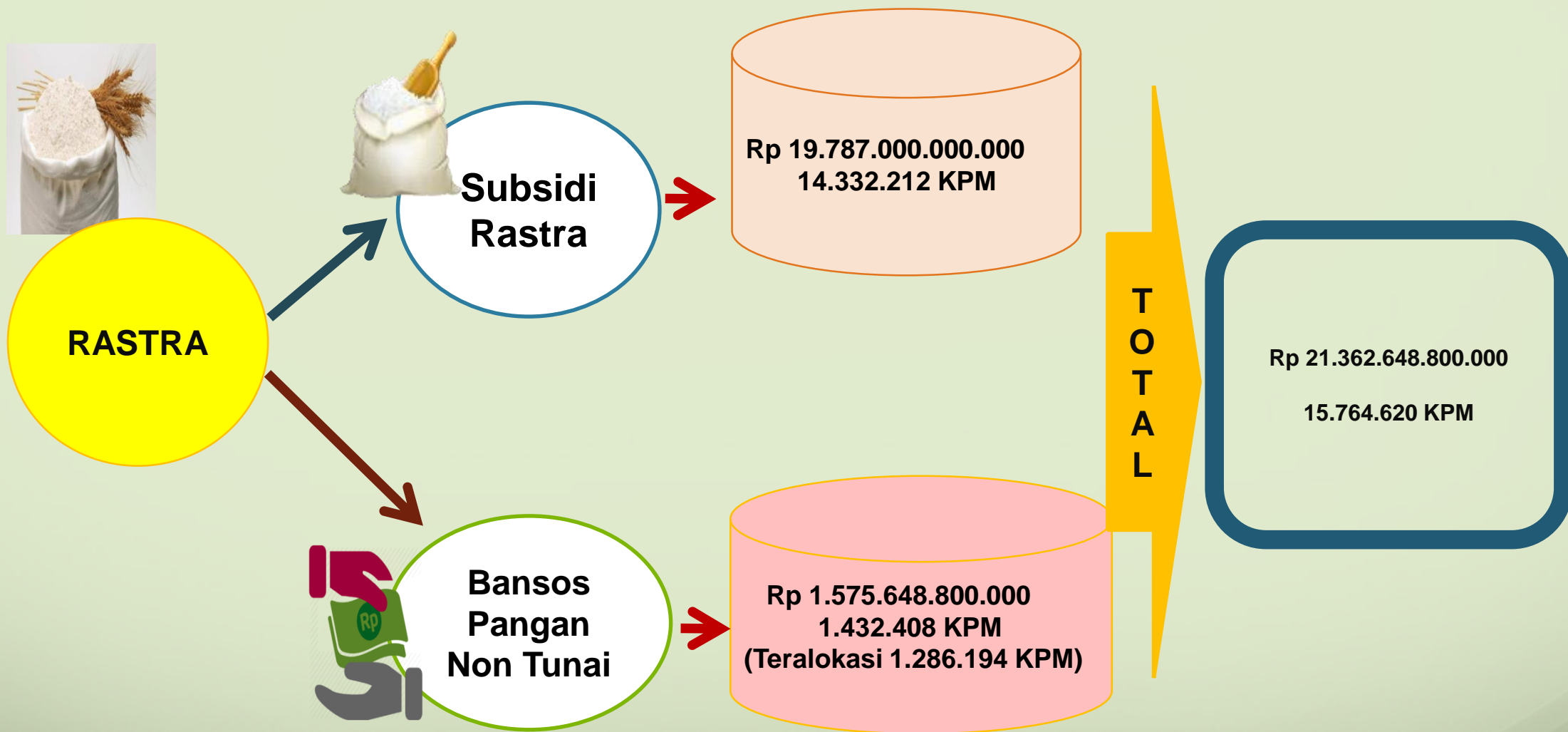


Perlu dilakukan:

1. Penyamaan jumlah variabel untuk data PBI, KKS, dan PKH yang **Non BDT**
2. **Pengelolaan dan pelayanan** data Kesos yang terpadu di **Pusdatin**



Penetapan hasil Verifikasi dan validasi data **BDT** di putuskan Mei dan Nopember setiap tahunnya



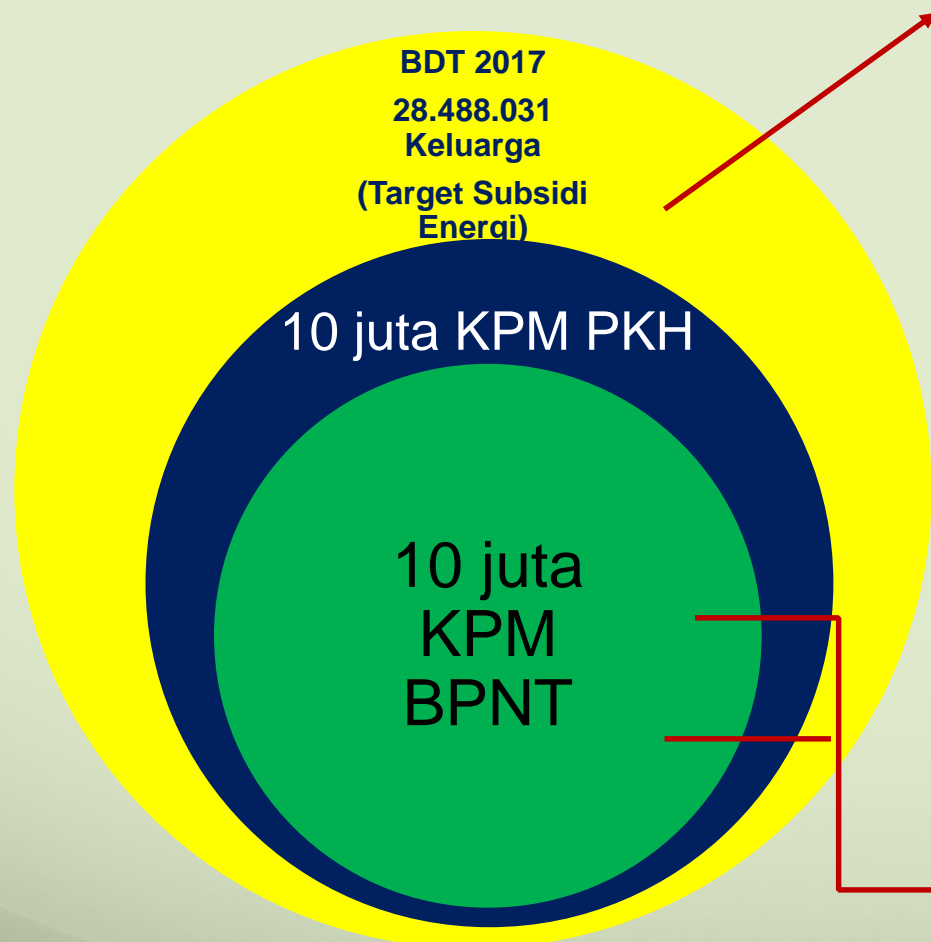
KPM= Keluarga Penerima Manfaat



Integrasi Bansos dalam KKS Tahun 2018



Data BNBA sesuai Kepmensos
57/HUK/2017 tgl 30 Mei 2017 ttg
Data Terpadu PFM



Penyaluran



Bantuan PKH dan BPNT sudah mulai disalurkan via KKS; Masih diperlukan KKS baru 20 juta.



KUBE dan Rutilahu

- KUBE merupakan suatu usaha dimana beberapa keluarga yang melakukan kegiatan usaha secara bersama/berkelompok.
- KUBE merupakan “wadah yang menghimpun dan mengelola keluarga binaan sosial yang telah mendapatkan bantuan sarana usaha dari pemerintah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupannya”...



KUBE dan Rutilahu

	KUBE (KPM)	BPSU (KPM)	RUTILAHU (KPM)
Perdesaan	73.600	500	1.000
Perkotaan	36.800	2.000	-
Pesisir/PP	20.000	15	710
Jumlah	130.400	2.515	1.710

Kelompok Usaha Bersama	Rp. 2.000.000 /KPM
Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 15.000.000 /KPM
Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Rp. 10.000.000 /KPM

Program Padat Karya

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin.

Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.

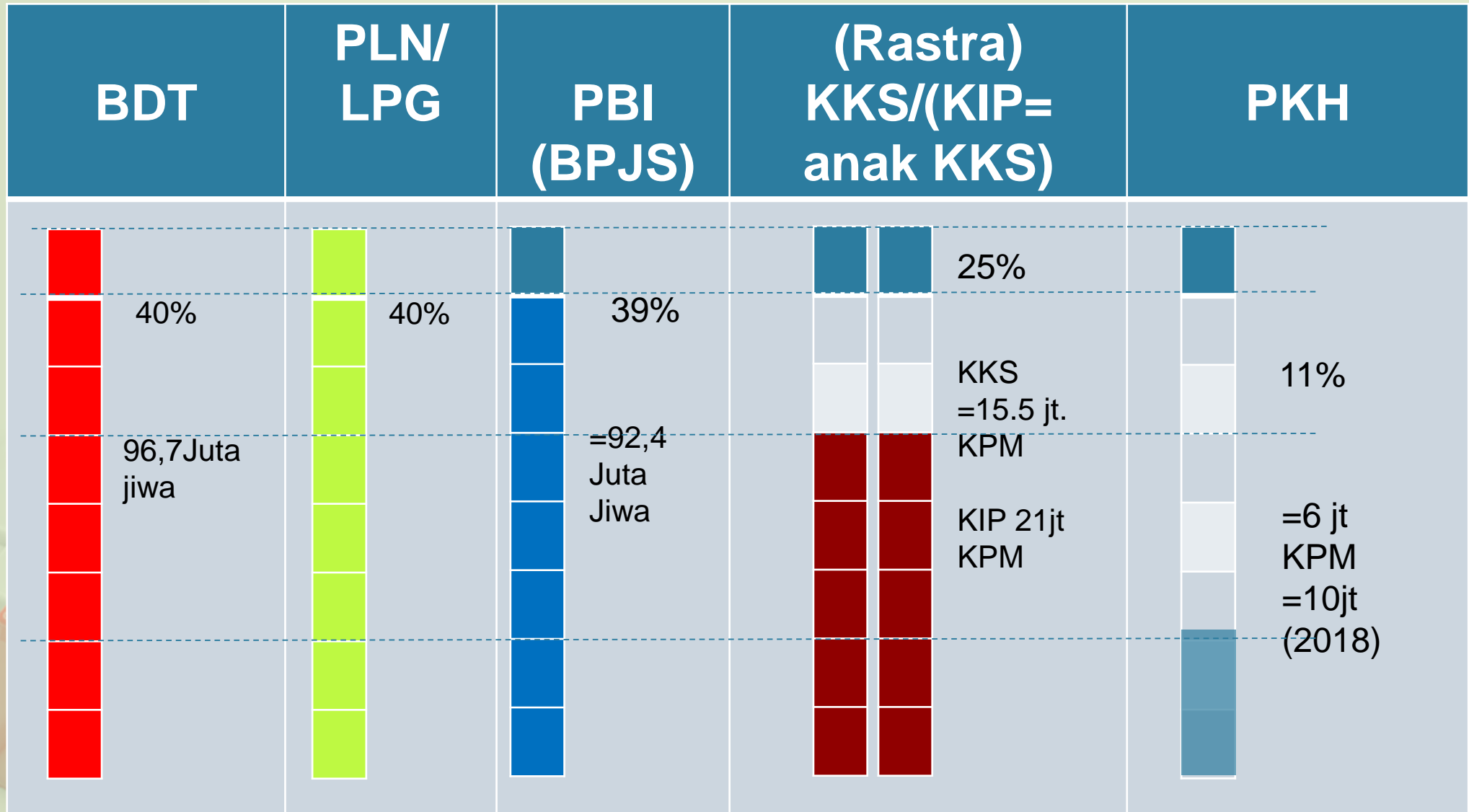
Masalah yang dihadapi dalam program kerja padat karya adalah faktor upah yang ideal bagi seorang pekerja.

Pemerintah akan lebih mementingkan proyek-proyek padat karya agar kegiatan tersebut dapat mendorong kepentingan golongan ekonomi rendah.

Program Padat Karya

- Program padat karya ini juga dilakukan dinegara lain, dalam rangka memperbaiki daya beli masyarakat.
- Program padat karya focus di desa, anggaran Rp.12T atau 20% dari dana Desa Rp 60T. Jika program ini dapat mempekerjakan 200 pekerja/desa, jia ada 74.000 Desa, maka bisa menyerap 15 juta tenaga kerja
- Jika bisa memberi lapangan kerja selama 4-5 bulan, maka program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

BDT dan Data KPM penerima Program





Terima Kasih

